

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Digital Accounting

2.1.1 Pengertian Digital Accounting

Menurut Asnidar et al., (2024) *Digital Accounting* merupakan bagian penting dibidang akuntansi yang telah mengubah cara bisnis beroperasi dan mengelola keuangan dari manual ke sistem digital. *Digital Accounting* tidak lagi bergantung pada pencatatan manual, tetapi menggunakan perangkat lunak akuntansi, aplikasi berbasis *cloud*, serta sistem informasi akuntansi terintegrasi untuk menghasilkan laporan keuangan yang lebih cepat, akurat, dan mudah diakses. Penerapan *digital Accounting* memungkinkan pelaku usaha memperoleh informasi keuangan secara *real time* sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dan berbasis data.

Secara konseptual, *digital Accounting* didefinisikan sebagai penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses akuntansi. (Fitriandinni & Riyadi, 2025) menyatakan secara langsung bahwa “*digital Accounting is the use of digital technology to create financial reports that are more efficient, accurate, and transparent*”. Definisi tersebut menegaskan bahwa digital

Accounting berfokus pada pemanfaatan teknologi sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas informasi keuangan, baik dari segi keakuratan maupun transparansi laporan keuangan. Definisi ini relevan dengan kebutuhan UMKM yang membutuhkan sistem pencatatan sederhana namun mampu menghasilkan informasi yang andal untuk pengelolaan usaha (Fitriandinni & Riyadi, 2025).

Selain itu, digital *Accounting* juga dipahami sebagai bagian dari sistem informasi akuntansi modern yang terintegrasi dengan teknologi digital. (Prasetianingrum & Sonjaya, 2024) menjelaskan bahwa digital *Accounting* tidak hanya mencakup penggunaan *software* akuntansi, tetapi juga integrasi teknologi seperti *cloud computing*, *data analytics*, dan *artificial intelligence* dalam pengelolaan data keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa digital *Accounting* merupakan sebuah transformasi menyeluruh dalam praktik akuntansi, bukan sekadar digitalisasi pencatatan transaksi. Dengan sistem yang terintegrasi, pelaku usaha dapat memantau kondisi keuangan secara berkelanjutan serta meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian usaha.

Dalam konteks UMKM, digital *Accounting* menjadi solusi atas keterbatasan pencatatan keuangan yang selama ini masih dilakukan secara manual dan tidak terstruktur. Digital *Accounting* membantu UMKM dalam menyusun laporan keuangan sesuai standar, mengurangi kesalahan pencatatan, serta meningkatkan akuntabilitas keuangan

usaha. Oleh karena itu, penerapan digital *Accounting* dipandang sebagai langkah strategis dalam meningkatkan profesionalisme pengelolaan keuangan UMKM di era digital (Judijanto et al., 2025).

2.1.2 Perkembangan Digital Accounting di Era Digital

Perkembangan digital *Accounting* di era digital tidak terlepas dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat. Awalnya, proses akuntansi hanya menggunakan komputer sebagai alat bantu pengolahan data, namun saat ini telah berkembang menjadi sistem digital yang terintegrasi dengan berbagai platform teknologi. Digital *Accounting* kini memanfaatkan teknologi *cloud*, aplikasi berbasis *mobile*, serta sistem otomatisasi yang memungkinkan pencatatan dan pelaporan keuangan dilakukan secara *real time*. Perkembangan ini memberikan kemudahan bagi pelaku usaha, termasuk UMKM, dalam mengakses informasi keuangan kapan saja dan di mana saja.

Seiring dengan era revolusi industri 4.0, digital *Accounting* mengalami transformasi signifikan dalam hal fungsi dan perannya. menyebutkan bahwa (Judijanto et al., 2025) perkembangan digital *Accounting* telah mengubah peran akuntansi dari sekadar alat pencatatan menjadi instrumen strategis dalam pengambilan keputusan bisnis. Mereka menyatakan bahwa teknologi digital seperti *artificial intelligence* dan *machine learning* memungkinkan analisis data keuangan dilakukan secara lebih mendalam dan bersifat prediktif.

Selain itu, digitalisasi dalam akuntansi ditandai dengan penggunaan berbagai teknologi seperti *software* akuntansi berbasis *cloud* yang memungkinkan akses data secara *real-time*, aplikasi pencatatan keuangan digital, sistem *Enterprise Resource Planning* (ERP) yang terintegrasi, *e-invoicing* atau faktur elektronik, serta integrasi dengan layanan *mobile banking* dan *marketplace*. Dengan demikian, digital *accounting* tidak hanya berfungsi untuk mencatat transaksi, tetapi juga berperan dalam mendukung perencanaan strategi bisnis serta pengelolaan risiko usaha. Perkembangan digital *Accounting* juga ditandai dengan meningkatnya penggunaan *software* akuntansi berbasis *cloud* yang dirancang khusus untuk UMKM. Sistem ini memungkinkan integrasi antara pencatatan transaksi, pengelolaan persediaan, hingga pelaporan keuangan secara otomatis.

Menurut Rahman Hakim et al., (2024) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa digitalisasi pencatatan keuangan pada UMKM mampu meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas laporan keuangan, meskipun tingkat adopsinya masih dipengaruhi oleh faktor literasi digital dan kesiapan sumber daya manusia. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan digital *Accounting* tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kesiapan pengguna dalam mengimplementasikannya.

Di era digital saat ini, perkembangan digital *Accounting* juga mendorong perubahan perilaku pelaku UMKM dalam mengelola keuangan usaha. Sistem digital memungkinkan pelaku usaha untuk lebih disiplin dalam pencatatan keuangan, memisahkan keuangan pribadi dan usaha, serta memantau Kinerja usaha secara periodik. (Prasetianingrum & Sonjaya, 2024) menegaskan bahwa digital *Accounting* berperan penting dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas keuangan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan pihak eksternal seperti perbankan dan investor terhadap UMKM.

Perkembangan digital *Accounting* di era digital menunjukkan bahwa akuntansi telah bertransformasi menjadi sistem yang lebih adaptif terhadap kebutuhan bisnis modern. Bagi UMKM, digital *Accounting* bukan hanya alat bantu administratif, tetapi juga sarana strategis untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha di tengah persaingan ekonomi yang semakin kompleks.

2.2 Aplikasi Digital Accounting

Perkembangan teknologi digital saat ini membuat pelaku UMKM mulai beralih dari pencatatan manual ke sistem digital. Penggunaan aplikasi digital *accounting* menjadi salah satu bentuk penyesuaian UMKM terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan usaha yang semakin modern.

Sebelumnya, banyak pelaku usaha melakukan pencatatan secara manual menggunakan buku tulis sehingga sering terjadi kesalahan pencatatan, data hilang, maupun kesulitan saat menghitung keuntungan usaha. Dengan adanya aplikasi digital *accounting*, proses pengelolaan keuangan menjadi lebih mudah, cepat, dan teratur.

Pada kondisi di lapangan, penggunaan aplikasi digital *accounting* pada UMKM masih beragam. Ada pelaku usaha yang sudah menggunakan aplikasi digital secara rutin, namun masih banyak juga yang hanya menggunakan pencatatan sederhana karena keterbatasan pengetahuan teknologi dan kebiasaan menggunakan sistem manual. Selain itu, pemilihan aplikasi biasanya disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan usaha masing-masing.

Beberapa aplikasi digital *accounting* yang banyak digunakan oleh UMKM antara lain:

1. Buku Kas

Aplikasi pencatatan keuangan sederhana untuk mencatat pemasukan, pengeluaran, dan hutang piutang usaha. Banyak digunakan UMKM karena mudah dioperasikan melalui *smartphone*.

2. Buku Warung

Digunakan untuk pencatatan transaksi usaha, pengelolaan hutang pelanggan, serta pemantauan arus kas usaha secara digital.

3. Majoo

Aplikasi kasir digital dan manajemen usaha yang membantu UMKM dalam pencatatan penjualan, stok barang, hingga laporan keuangan.

4. Accurate

Aplikasi akuntansi digital yang membantu proses pembukuan, pengelolaan persediaan, dan penyusunan laporan keuangan UMKM.

5. Kasir Pintar

Aplikasi kasir digital yang digunakan untuk membantu transaksi penjualan, pencatatan stok, dan laporan penjualan usaha kecil.

2.3 Literasi Digital Pelaku UMKM

Menurut (Lia Tasliah et al., 2024) Literasi digital merupakan kemampuan seseorang dalam mengakses, memahami, mengevaluasi, dan memanfaatkan informasi melalui teknologi digital secara efektif. Literasi digital juga berkaitan dengan kemampuan individu dalam menggunakan teknologi dan media digital secara tepat dalam aktivitas sehari-hari maupun kegiatan usaha. Dalam kegiatan usaha, literasi digital menjadi kemampuan penting karena membantu pelaku UMKM menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi yang semakin berkembang. Literasi digital tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menggunakan perangkat teknologi, tetapi juga kemampuan memahami informasi digital dan memanfaatkan teknologi secara tepat dalam kegiatan usaha.

Pada UMKM, literasi digital berhubungan dengan kemampuan pelaku usaha dalam menggunakan aplikasi digital seperti aplikasi pembukuan, pembayaran digital, media sosial, marketplace, dan aplikasi digital *accounting*. Kemampuan tersebut membantu pelaku usaha dalam mengelola transaksi usaha, melakukan pencatatan keuangan, serta mempermudah proses pemasaran produk. Semakin baik kemampuan digital yang dimiliki, maka semakin mudah pelaku usaha beradaptasi dengan perkembangan teknologi usaha.

Tingkat literasi digital pelaku UMKM masih berbeda-beda. Sebagian pelaku usaha sudah mampu menggunakan teknologi digital dalam aktivitas usaha sehari-hari, seperti melakukan transaksi non tunai, promosi melalui media sosial, hingga penggunaan aplikasi pencatatan keuangan digital. Namun, masih terdapat pelaku usaha yang mengalami kesulitan dalam penggunaan teknologi karena faktor usia, pendidikan, kurangnya pengetahuan teknologi, dan keterbatasan pelatihan digital. Kondisi tersebut menyebabkan penerapan digital *accounting* pada beberapa UMKM belum berjalan maksimal.

Literasi digital juga berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan usaha. Pelaku usaha yang memiliki kemampuan digital yang baik cenderung lebih mudah memahami penggunaan aplikasi akuntansi digital, melakukan pencatatan transaksi secara rutin, serta menyusun laporan keuangan usaha dengan lebih teratur. Selain itu, penggunaan teknologi digital dapat membantu

pelaku usaha mengurangi kesalahan pencatatan dan meningkatkan efisiensi pengelolaan usaha.

Dalam meningkatkan literasi digital UMKM, pelatihan dan pendampingan menjadi hal yang penting. Adanya pelatihan penggunaan aplikasi digital dan edukasi mengenai teknologi usaha dapat membantu pelaku UMKM memahami manfaat digitalisasi dalam pengembangan usaha. Dukungan dari pemerintah dan instansi pembina UMKM juga diperlukan agar pelaku usaha mampu mengikuti perkembangan teknologi dan meningkatkan kualitas pengelolaan usaha di era digital.

2.4 Usaha Kecil Mikro Menengah (UMKM)

2.4.1 Pengertian Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM)

Menurut Pemerintah Republik Indonesia dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, UMKM adalah kegiatan usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh orang perorangan atau badan usaha, dengan pengelompokan yang kini didasarkan pada besaran modal usaha atau omzet (penjualan) tahunan UMKM didefinisikan sebagai usaha produktif milik perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria tertentu dalam aset dan hasil penjualan tahunan, yang dibedakan menjadi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah berdasarkan batasan yang telah ditetapkan dalam peraturan tersebut. UMKM memiliki peran penting dalam struktur perekonomian karena

jumlahnya yang dominan dan kontribusinya terhadap kegiatan ekonomi lokal maupun nasional. Definisi ini menunjukkan bahwa UMKM bukan hanya sekadar usaha berskala kecil, tetapi juga elemen penting dalam pengembangan ekonomi di tingkat masyarakat (Sinaga, 2024).

Menurut Rahmini (2017) dalam Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis, UMKM merupakan unit usaha yang memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional karena jumlahnya yang dominan serta kemampuan dalam menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. UMKM juga dinilai memiliki struktur organisasi yang sederhana, sehingga proses pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan cepat dan menyesuaikan dengan perubahan pasar. Hal ini menjadikan UMKM sebagai sektor yang relatif tahan terhadap krisis ekonomi dibandingkan usaha berskala besar.

Secara yuridis, pengertian UMKM di Indonesia merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa UMKM adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan bukan merupakan anak perusahaan atau cabang dari usaha besar. Definisi ini menegaskan bahwa UMKM memiliki kemandirian dalam pengelolaan usaha serta keterbatasan sumber daya, baik dari sisi modal, teknologi, maupun manajemen. Dalam konteks akademik, definisi tersebut banyak digunakan sebagai dasar analisis dalam penelitian-penelitian terkait pengembangan UMKM (Musdhalifah, 2020).

Menurut Yolanda et al., (2024) dalam Jurnal Ekonomi Pembangunan, UMKM tidak hanya dipahami sebagai unit usaha kecil dari sisi skala ekonomi, tetapi juga sebagai pilar utama pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan. UMKM berperan penting dalam mendukung distribusi pendapatan yang lebih merata dan mengurangi kesenjangan ekonomi antarwilayah. Dengan karakteristik yang berbasis pada sumber daya lokal, UMKM mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Dalam perspektif manajerial, UMKM juga diartikan sebagai usaha yang dikelola secara langsung oleh pemilik dengan tingkat formalitas yang relatif rendah, terutama dalam aspek administrasi dan pencatatan keuangan. Hal ini diperkuat oleh penelitian Purnama et al. menyatakan bahwa sebagian besar UMKM masih menjalankan kegiatan usaha berdasarkan pengalaman dan intuisi pemilik, sehingga memerlukan pendampingan dan pembinaan agar dapat berkembang secara profesional.

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa UMKM merupakan usaha ekonomi produktif yang berskala kecil hingga menengah, bersifat mandiri, adaptif, dan berperan penting dalam pembangunan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun daerah. Pemahaman yang komprehensif mengenai pengertian UMKM menjadi dasar penting dalam merumuskan kebijakan pembinaan dan strategi

pengembangan UMKM, termasuk dalam penerapan digital *Accounting* untuk meningkatkan Kinerja usaha.

2.4.2 Kriteria UMKM Menurut Perundang-Undangan

Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) digunakan untuk membedakan jenis usaha berdasarkan kemampuan dan skala usaha yang dimiliki. Adanya pengelompokan UMKM membantu pemerintah dalam memberikan pembinaan, bantuan, pelatihan, dan program pemberdayaan usaha secara lebih tepat. Selain itu, klasifikasi UMKM juga dapat digunakan untuk melihat perkembangan suatu usaha dari usaha berskala kecil hingga usaha yang lebih besar.

Berdasarkan Pemerintah Republik Indonesia dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, UMKM dibagi menjadi tiga jenis, yaitu usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Penentuan kriteria tersebut didasarkan pada modal usaha dan hasil penjualan tahunan. Modal usaha yang dimaksud tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Adapun 3 jenis usaha yaitu:

1. Usaha Mikro

Usaha mikro merupakan usaha produktif milik perorangan dengan skala usaha paling kecil. Usaha mikro memiliki modal usaha paling banyak Rp1 Miliar dan hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 2 Miliar. Pada umumnya, usaha mikro masih menggunakan pengelolaan usaha yang sederhana, baik dalam kegiatan operasional

maupun pencatatan keuangan. Sebagian pelaku usaha juga masih melakukan pencatatan transaksi secara manual.

2. Usaha Kecil

Usaha kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan bukan bagian dari perusahaan besar. Usaha kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp 1 Miliar sampai Rp 5 Miliar dengan hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2 Miliar sampai Rp 15 Miliar. Pelaku usaha kecil biasanya mulai melakukan pengembangan usaha dan mulai memanfaatkan teknologi dalam kegiatan usaha, seperti pemasaran digital maupun aplikasi pencatatan keuangan.

3. Usaha Menengah

Usaha menengah merupakan usaha dengan skala yang lebih besar dibanding usaha kecil. Usaha menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp 5 Miliar sampai Rp 10 Miliar dan hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 15 Miliar sampai Rp50 Miliar. Pada usaha menengah, pengelolaan usaha umumnya sudah lebih terstruktur dan penggunaan teknologi dalam kegiatan operasional maupun pengelolaan keuangan sudah lebih baik.

2.4.3 Peran UMKM dalam Perekonomian Daerah

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian daerah karena sektor ini

menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi lokal. Berdasarkan penelitian, UMKM berkontribusi besar dalam penyerapan tenaga kerja di tingkat daerah dan nasional, sehingga mampu menurunkan angka pengangguran dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat. UMKM juga bertindak sebagai pilar ekonomi yang inklusif karena menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, terutama dari kelompok masyarakat yang belum terserap oleh sektor formal, sehingga memperkuat stabilitas sosial ekonomi di daerah.

UMKM menyumbang kontribusi nyata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan struktur ekonomi lokal yang bersifat dinamis. UMKM mampu menghadirkan aktivitas produksi dan distribusi barang serta jasa yang beragam, sehingga menopang perekonomian lokal yang terkadang kurang dijangkau oleh pelaku usaha besar atau industri padat modal. UMKM juga berperan dalam pemberdayaan ekonomi lokal karena banyak usaha yang berbasis pada potensi sumber daya lokal seperti kerajinan, kuliner, dan produk agraris, yang kemudian menciptakan nilai tambah dan peluang usaha baru bagi Masyarakat (Musfiroh et al., 2022)

Peran UMKM dalam perekonomian daerah juga terlihat dari kontribusinya terhadap pemerataan pendapatan ekonomi masyarakat. UMKM sering kali beroperasi di berbagai wilayah, termasuk di daerah

pedesaan dan perkotaan kecil, sehingga mampu mengurangi disparitas ekonomi antarwilayah. Keberadaan UMKM menjadikan perekonomian daerah lebih mandiri dan resilient terhadap tekanan ekonomi eksternal karena sifatnya yang adaptif dan fleksibel dalam menghadapi perubahan pasar. Dengan adanya dukungan kebijakan pemerintah daerah yang tepat, UMKM dapat terus berkembang dan memperkuat pondasi ekonomi lokal (Suryadi, 2023).

Peran ekonomi langsung, UMKM juga mendukung pertumbuhan sosial ekonomi melalui inovasi dan pemberdayaan masyarakat. UMKM memfasilitasi peningkatan keterampilan wirausaha serta mendorong munculnya inovasi produk dan layanan baru untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal maupun nasional. Peranan ini semakin penting dalam konteks pembangunan daerah yang menekankan pada pemanfaatan potensi lokal serta sinergi antara pemerintah daerah, pelaku UMKM, dan komunitas masyarakat (Aprieni et al., 2024).

2.5 Kinerja UMKM

2.5.1 Pengertian Kinerja UMKM

Menurut Afendi (2022) Kinerja UMKM merupakan hasil yang dicapai usaha dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, yang dipengaruhi oleh inovasi produk, orientasi pasar, kemampuan pelayanan, dan keunggulan kompetitif. Kinerja ini mencerminkan kemampuan UMKM

dalam mengelola sumber daya, mempertahankan dan meningkatkan profit, serta beradaptasi terhadap perubahan lingkungan bisnis. Dalam kajian UMKM, Kinerja bukan hanya diukur dari nilai keuntungan, tetapi juga dari indikator yang mencakup efektivitas, stabilitas, dan daya saing usaha dalam jangka panjang. Menurut penelitian yang dilakukan di Sleman, Kinerja UMKM dipengaruhi oleh literasi keuangan dan orientasi kewirausahaan, di mana *financial literacy* dan *entrepreneurial orientation* berkontribusi positif dan signifikan terhadap Kinerja UMKM” sebagai indikator keberhasilan UMKM dalam menghadapi persaingan pasar (Ridho & Pahlevi, 2025).

Selain itu, evaluasi kinerja UMKM dapat dilakukan melalui indikator yang lebih terstruktur seperti *Key Kinerjance Indicators* (KPI) yang mencakup dimensi keuangan, pemasaran dan penjualan, layanan pelanggan, operasional, serta manajemen sumber daya manusia. Pendekatan *Key Kinerjance Indicators* (KPI) ini membantu peneliti dan pengelola UMKM untuk melihat Kinerja usaha secara komprehensif, sehingga dapat memahami area yang memerlukan perbaikan atau penguatan dalam strategi bisnis (Setiawan, 2024).

Secara umum, indikator Kinerja UMKM mencerminkan kemampuan usaha dalam menciptakan pertumbuhan usaha yang berkelanjutan, meningkatkan efisiensi operasional, serta memaksimalkan nilai ekonomi baik bagi pelaku usaha maupun

pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengembangan UMKM di tingkat lokal maupun nasional.

2.5.2 Indikator Kinerja UMKM

Menurut (Dewi et al., 2022) indikator Kinerja UMKM adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai keberhasilan usaha melalui berbagai aspek seperti keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan usaha. Pengukuran tersebut bertujuan untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi kegiatan usaha yang dijalankan oleh UMKM.

Kinerja UMKM dapat diukur melalui beberapa indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan usaha dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Indikator tersebut mencerminkan kemampuan UMKM dalam mengelola usaha, meningkatkan keuntungan, mempertahankan pelanggan, serta mengembangkan usaha secara berkelanjutan. Beberapa ahli mengemukakan indikator kinerja UMKM yang berbeda sesuai dengan fokus penelitian yang dilakukan. Adapun indikator kinerja UMKM menurut Mawuntu & Aotama (2019) adalah sebagai berikut:

a. Aspek keuangan

Aspek Keuangan digunakan untuk melihat kemampuan UMKM dalam meningkatkan omzet, laba usaha, dan mengelola keuangan secara efektif.

b. Kepuasan pelanggan

Kepuasan Pelanggan ditujukan guna menunjukkan kemampuan usaha dalam memenuhi kebutuhan dan memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen.

c. Proses bisnis internal

Proses bisnis internal berkaitan dengan efektivitas kegiatan operasional usaha, seperti proses produksi, pelayanan, dan pengelolaan usaha.

d. Pembelajaran dan pertumbuhan usaha

Pembelajaran dan pertumbuhan usaha guna mengukur kemampuan UMKM dalam mengembangkan kualitas sumber daya manusia, inovasi, dan pengembangan usaha secara berkelanjutan.

Dengan adanya indikator kinerja, pelaku UMKM dapat mengetahui perkembangan usahanya serta menentukan strategi yang tepat untuk meningkatkan Kinerja usaha secara berkelanjutan.

2.5.3 Faktor-faktor Perkembangan Kinerja UMKM

Kinerja UMKM dipengaruhi oleh berbagai faktor internal maupun eksternal yang saling berkaitan. Faktor internal mencakup aspek seperti literasi keuangan, kompetensi pengelola, dan orientasi kewirausahaan yang dimiliki pelaku UMKM. Penelitian di Sleman menunjukkan bahwa literasi keuangan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja UMKM, di mana semakin tinggi pemahaman keuangan pelaku

usaha, semakin tinggi pula kemampuan mereka dalam membuat keputusan bisnis yang tepat dan meningkatkan Kinerja usaha secara keseluruhan (Ridho & Pahlevi, 2025).

Faktor Perkembangan Kinerja UMKM di Indonesia Menurut Nurrohmah (2015:25), indikator perkembangan usaha yang dapat diukur diantaranya sebagai berikut :

- a. Omset penjualan : Omset penjualan total output produksi yg bisa dijual pada sekali bakulan atau penjualan yg didapatkan sang pengusaha UMKM. Adapun omset penjualan ini merupakan hitungan menggunakan mengalikan total jumlah yg terjual menggunakan harga.
- b. Pertumbuhan energi kerja : Jumlah energi kerja adalah pekerja yg bekerja pada UMKM tersebut.
- c. Pertumbuhan Pelanggan sebagai Skala Pengembangan Bisnis: Pelanggan terkadang disebut sebagai konsumen.

Literasi keuangan, faktor internal lain yang memengaruhi Kinerja UMKM adalah kompetensi sumber daya manusia serta manajemen usaha. Menurut Surjadi et al., (2025) menemukan bahwa pengelolaan keuangan yang baik, kemampuan pengambilan keputusan yang efektif, serta strategi pengelolaan sumber daya manusia berkontribusi positif terhadap peningkatan Kinerja keuangan UMKM di Pulau Jawa, khususnya dalam hal pengelolaan sistem informasi

akuntansi yang terintegrasi dalam manajemen usaha. Hal tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan UMKM tidak hanya ditentukan oleh besarnya modal usaha, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan pelaku usaha dalam mengelola keuangan, memanfaatkan teknologi informasi, mengatur sumber daya manusia, serta menerapkan sistem manajemen usaha yang terorganisir.

Faktor eksternal juga memiliki peran penting dalam memengaruhi Kinerja UMKM. Akses terhadap pembiayaan, dukungan pemerintah, kondisi pasar, dan perkembangan teknologi merupakan elemen yang menentukan kemampuan UMKM untuk tumbuh dan bersaing. Sebagai contoh, literasi keuangan dan inklusi keuangan menjadi faktor penting dalam peningkatan kinerja keuangan UMKM di Indonesia, di mana UMKM yang memiliki akses dan pemahaman terhadap sistem keuangan cenderung menunjukkan Kinerja yang lebih baik, mencerminkan pentingnya dukungan eksternal dalam pengembangan usaha (Putri et al., 2023)

Kemampuan sumber daya manusia yang baik dapat membantu pelaku UMKM dalam menghadapi perubahan pasar, meningkatkan produktivitas usaha, serta menciptakan strategi bisnis yang lebih efektif sehingga usaha dapat berkembang secara berkelanjutan. Kompetensi sumber daya manusia dan faktor budaya juga ditemukan berpengaruh terhadap kinerja UMKM. Penelitian di Jepara menyatakan bahwa

literasi keuangan syariah dan kompetensi sumber daya insani turut menjadi faktor yang memengaruhi Kinerja UMKM, menunjukkan bahwa aspek budaya dan kemampuan SDM dapat menjadi faktor penguat dalam meningkatkan daya saing usaha (Ananda & Pebruary, 2025).

Faktor pendukung lain untuk Kinerja adalah orientasi teknologi dan inovasi. Dalam konteks era digital, UMKM yang mampu mengadopsi teknologi serta meningkatkan pemahaman digital cenderung memiliki Kinerja yang lebih baik karena dapat memperluas pasar, meningkatkan efisiensi usaha, dan merespons permintaan pasar dengan lebih cepat. Penelitian di Bogor juga menegaskan bahwa pemahaman teknologi dan dukungan program pelatihan berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM, khususnya dalam meningkatkan volume penjualan dan daya saing usaha (Mursyidah, 2024).

Selain orientasi teknologi dan inovasi, penerapan digital accounting juga menjadi faktor yang mendukung peningkatan kinerja UMKM. Penggunaan aplikasi digital *accounting* memungkinkan pelaku usaha melakukan pencatatan transaksi secara lebih akurat, memperoleh informasi keuangan secara cepat, serta menghasilkan laporan yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Dengan tersedianya informasi keuangan yang lebih terstruktur, pelaku UMKM dapat mengendalikan arus kas, memantau pendapatan dan

biaya operasional, mengelola persediaan, serta mengevaluasi perkembangan usaha secara berkala. Kondisi tersebut mendorong peningkatan efisiensi pengelolaan usaha, meminimalkan kesalahan pencatatan, dan mendukung terciptanya kinerja UMKM yang lebih baik.

2.6 Penelitian Terdahulu

2.6.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

NO	NAMA PENELITI (TAHUN)	JUDUL PENELITIAN	METODE PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
1.	M. Fahrezi Ramadhani et al., (2023)	"Penerapan Digital <i>Accounting</i> pada Era Digitalisasi untuk Meningkatkan Kinerja UMKM di Kelurahan Nginden Jangkungan Surabaya"	Deskriptif Kualitatif	Penerapan digital <i>Accounting</i> mampu meningkatkan Kinerja UMKM, mempermudah pencatatan dan pelaporan keuangan, mengurangi human error, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan
2.	Aryanto & Amaliyah (2022)	"Pengaruh Pengetahuan Akuntansi dan Akuntansi Digital terhadap Kinerja UMKM"	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap

				penerapan akuntansi digital. Akuntansi digital juga berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja UMKM, signifikan terhadap kinerja UMKM.
3.	Fanniar Aurelia et al., (2023)	"Peranan Sistem Digital <i>Accounting</i> Terhadap Perkembangan Bisnis UMKM di Sidoarjo"	Deskriptif Kualitatif	Sistem digital <i>Accounting</i> berperan positif dan signifikan dalam pengembangan bisnis UMKM di Sidoarjo, ditandai dengan peningkatan penjualan, kemudahan pencatatan dan pelaporan keuangan, pengurangan human error, efisiensi operasional, serta peningkatan omset dan kualitas pengambilan keputusan bisnis
4.	Mutiara Nur Fitriandinni & Riyadi, n.d. (2025)	"Implementasi Digital <i>Accounting</i> Pada Era Digitalisasi Untuk Meningkatkan Kinerja UMKM di Kelurahan Desa Tambak Sawah Waru Sidoarjo"	Deskriptif Kualitatif	Implementasi digital <i>Accounting</i> memberikan pengaruh positif terhadap Kinerja UMKM, ditunjukkan dengan peningkatan efisiensi pencatatan keuangan, pengurangan risiko kesalahan pencatatan (human error),

				keamanan data yang lebih baik, serta membantu pengambilan keputusan bisnis yang lebih akurat dan meningkatkan produktivitas usaha
5.	Ridwan et al., (2025)	"Digitalisasi Sistem Keuangan UMKM: Pelatihan Praktis Pencatatan dan Pelaporan Keuangan Digital untuk Pelaku Usaha Serat Agel di Daerah Istimewa Yogyakarta"	Deskriptif Kualitatif	Terjadi peningkatan pemahaman peserta sebesar rata-rata 60%. Seluruh peserta mampu mencatat transaksi dan menyusun laporan keuangan digital menggunakan SIAPIK. Sebanyak 100% peserta merasa materi relevan dan 10 dari 12 peserta siap mengadopsi SIAPIK secara berkelanjutan.
